



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

Inspektorat Kabupaten Balangan

INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN
Jl. A. Yani Km. 3,5 Paringin Telp. (0256) 2028395 Fax. (0526) 2028248
Paringin Selatan 71662
Email : Inspektoratblg@gmail.com



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2024 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan yang berkesinambungan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Patingin, Juli 2024
Inspektur Kabupaten Balangan



Drs. Urai Nur Iskandar, MM
NIP. 19730501 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan keuangan.....	7
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan	19
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	20
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran	22
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
3.3. Rencana Perubahan Renja	25
3.4. Dampak Sosial Ekonomi	29
BAB IV PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra Penyesuaian Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Inspektorat tahun 2024 adalah:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengawasan antar wilayah, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk periode 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2024 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2024. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2024, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.3 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

1.4 **SISTEMATIKA PENULISAN**

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Bab 3 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab 4 Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Balangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat tahun 2023 dan capaian target Renstra Inspektorat, pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tabel Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD 2023 yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	74 BB	72 BB	73,95 BB	102,71	73,95 BB	99,93	
	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100 Persen	100 Persen	10 Persen	10	10,00 Persen	10	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disampaikan Dengan Baik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4 Dokumen	33,33	INSPEKTORAT
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	8 Laporan	33,33	INSPEKTORAT

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3805 orang	678 orang	594 orang	87,61	1224 orang	32,17	INSPEKTORAT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 paket	5 paket	5 paket	100	8 paket	57,14	INSPEKTORAT
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240 pegawai	54 pegawai	65 pegawai	120,37	90 pegawai	37,5	INSPEKTORAT
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110 pegawai	20 pegawai	86 pegawai	430	86 pegawai	78,18	INSPEKTORAT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	9 Paket	6 Paket	66,67	10 Paket	34,48	INSPEKTORAT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2 paket	2 paket	100	4 paket	33,33	INSPEKTORAT
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	720 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	100	240 dokumen	33,33	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325 Laporan	60 Laporan	83 Laporan	138,33	143 Laporan	44	INSPEKTORAT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKBU	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	19 Unit	4 Unit	4 Unit	100	7 Unit	36,84	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	24 Bulan	33,33	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	36 Laporan	58,06	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100	200 Laporan	200	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	24 Laporan	33,33	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	24 Bulan	33,33	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	37 unit	64 unit	172,97	101 unit	45,5	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	37 unit	64 unit	172,97	101 unit	45,5	INSPEKTORAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1 unit	1 unit	100	2 unit	33,33	INSPEKTORAT
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	24 Bulan	33,33	

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	37 unit	64 unit	172,97	101 unit	45,5	INSPEKTORAT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	37 unit	64 unit	172,97	101 unit	45,5	INSPEKTORAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1 unit	1 unit	100	2 unit	33,33	INSPEKTORAT
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 Persen	78 Persen	89 Persen	114,1	89 Persen	104,71	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	70 Persen	55 Persen	80 Persen	145,45	146 Persen	208,57	
	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan	80 Persen	68 Persen	54 Persen	79,41	54 Persen	67,5	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	198 Laporan	33 Laporan	84 Laporan	254,55	117 Laporan	59,09	INSPEKTORAT
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 Laporan	10 Laporan	56 Laporan	560	64 Laporan	128	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	4 Laporan	33,33	INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	0	INSPEKTORAT
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	116,67	9 Laporan	25	INSPEKTORAT
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	8 Dokumen	33,33	INSPEKTORAT
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD/Desa di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	62 Persen	53 Persen	30 Persen	56,6	116 Persen	187,1	
	Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	4 Laporan	33,33	INSPEKTORAT
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	438 Laporan	73 Laporan	88 Laporan	120,55	204 Laporan	46,58	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	12 SKPD	6 SKPD	0 SKPD	0	0 SKPD	0	
	Level Maturitas SPIP	3	3	3	100	3	100	
	Indeks Integritas	82	79	0	0	0	0	
	Level kapabilitas APIP	3	3	3	100	3	100	

Pendampingan dan Asistensi	Prenstase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	200 Persen	200	
	Nilai PMPRB	75 Persen	72 Persen	0 Persen	0	0 Persen	0	
	Persentase Pencapaian Indikator MCP	79 Persen	76 Persen	82 Persen	107,89	82 Persen	103,8	
	Jumlah unit kerja yang diusulkan predikat WBK/WBBM	14 SKPD	8 SKPD	6 SKPD	75	6 SKPD	42,86	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	180 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100	60 Perangkat Daerah	33,33	INSPEKTORAT
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	196 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100	60 Perangkat Daerah	30,61	INSPEKTORAT
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	6 kegiatan	33,33	INSPEKTORAT
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	186 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	73,33	52 Perangkat Daerah	27,96	INSPEKTORAT

2.2 Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024 yang dievaluasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Inspektorat	73 Nilai	18.603.894.570	0 Nilai	7.482.011.708
		Nilai IKM Inspektorat	88 Persen		84.18 Persen	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	67.778.800	98 Persen	31.340.400
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	2.495.000	1 Laporan	0

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	65.283.800	2 Laporan	31.340.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	13.893.269.970	105 Persen	5.664.742.131
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Pegawai	13.893.269.970	341 Pegawai	5.664.742.131
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.873.014.100	75 Persen	735.134.518
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	119.059.100	1 Paket	34.000.000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Pegawai	669.255.000	8 Pegawai	253.513.888
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Pegawai	1.084.700.000	14 Pegawai	447.620.630
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	1.574.329.200	98 Persen	674.218.717
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	445.275.100	2 Paket	150.650.000

8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	87.236.100	0 Paket	36.729.399
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	47.192.000	12 Dokumen	2.720.000
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	994.626.000	40 Laporan	484.119.318
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen	438.321.200	98 Persen	193.013.410
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.100.000	1 Laporan	6.070.000
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	205.224.900	25 Laporan	68.860.410
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	226.996.300	6 Laporan	118.083.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	757.181.300	98 Persen	183.562.532
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	497.223.000	10 Unit	118.323.832

15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	259.958.300	3 unit	65.238.700
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase SKPD yang selesai TLHP	55 Persen	4.327.067.000	0 Persen	390.049.396
		Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	60 Persen		0 Persen	
		Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	60 Persen		0 Persen	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	18 SKPD	3.609.977.000	0 SKPD	254.078.496
		Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administrasi dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti	180 Rekomendasi		0 Rekomendasi	
16	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	33 LHP	289.700.000	1 LHP	63.219.600
17	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 LHP	580.177.000	1 LHP	65.264.136
18	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 LHP	52.500.000	0 LHP	16.050.000
19	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 LHP	62.190.000	1 LHP	58.176.700
20	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	6 LHP	1.494.990.000	0 LHP	0

21	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 LHP	1.130.420.000	1 LHP	51.368.060
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 Persen	717.090.000	125 Persen	135.970.900
		Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	4.2 Nilai		0 Nilai	
22	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Laporan	42.990.000	0 Laporan	4.500.000
23	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	73 LHP	674.100.000	36 LHP	131.470.900
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	25 Persen	2.420.213.600	6.25 Persen	543.015.801
		Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	85 Persen		97.83 Persen	
		Nilai MCP	92 Persen		0 Persen	
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM	8 SKPD	2.420.213.600	3 SKPD	543.015.801
		Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	82 Persen		0 Persen	

		Prosentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi	92 Persen		16.1 Persen	
24	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 Perangkat Daerah	177.575.000	0 Perangkat Daerah	15.780.000
25	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 perangkat daerah	302.330.000	0 perangkat daerah	175.588.969
26	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.082.523.000	0 Kegiatan	164.809.788
27	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	857.785.600	3 Perangkat Daerah	186.837.044

Berdasarkan tabel diatas, Inspektorat Kabupaten Balangan pada tahun 2024 mencakup 3 Program, 9 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategik.

Uraian selengkapnya capaian kinerja per indikator sampai dengan bulan Juni 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Pagu anggaran: Rp. 67.778.800,- realisasi sebesar Rp. 31.340.400,- dan sisa pagu anggaran sebesar Rp.47.287.880,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.2.495.000,- realisasi sebesar Rp.0,00 sisa pagu anggaran sebesar Rp. 2.495.000,-.

Realisasi kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sampai dengan bulan juni 50% yaitu telah tersusunnya rancangan Awal Renja Tahun 2025 dan Matrik Renja Perubahan Tahun 2024. Saat ini sedang berproses dokumen Renja Perubahan tahun 2024 dan Renja tahun 2025, sedangkan realisasi keuangan masih 0 karena kegiatan penyusunan masih berjalan sehingga realisasi keuangan akan dilaksanakan pada triwulan III.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 65.283.800,- realisasi sebesar Rp. 31.340.400,- sisa anggaran sebesar Rp.33.943.400,-.

Realisasi kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah telah tersusunnya laporan capaian kinerja sampai dengan triwulan II. Sedangkan Realisasi Keuangan sebesar 48 % yaitu untuk pembayaran gaji tenaga kontrak sampai dengan bulan juni 2024.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar Rp. 13.893.269.970,- realisasi sebesar Rp.5.664.742.131,- sisa anggaran sebesar Rp.8.228.527.839,-

Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 50% yaitu telah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 6 bulan yaitu bulan januari sampai dengan bulan juni 2024 dan telah dibayarkan gaji 13 serta THR bagi ASN dan PPPK, sedangkan capaian realisasi keuangan sampai dengan bulan juni sebesar 40,7%.

c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah

1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Pagu anggaran sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya adalah sebesar Rp. 119.059.100,- realisasi Rp.34.000.000,- sisa pagu anggaran sebesar Rp. 85.059.100,-

Capaian kinerja sebesar 33% yaitu telah tersedia 1 paket pengadaan baju sasirangan hari jadi Kabupaten Balangan untuk seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan, sedangkan 2 paket pengadaan baju PDH masih dalam proses pengadaan. Sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 28,5%.

2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Pagu anggaran sebesar Rp.669.255.000,- realisasi sebesar Rp.253.513.888,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.415.741.112,- atau sebesar 37,88%

3) Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan

Pagu anggaran sebesar Rp.1.084.700.000,- realisasi sebesar Rp.447.620.630,- sisa pagu anggaran sebesar Rp.637.079.370,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 41,27%.

d. Administrasi umum perangkat daerah

1) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar Rp.445.275.100,- realisasi sebesar Rp.150.650.000,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 33,83%

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 25 % yaitu telah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa laptop, printer dan meja kursi kerja.

2) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pagu anggaran sebesar Rp.87.236.100,- realisasi sebesar Rp.36.729.399,- sisa anggaran sebesar Rp.50.506.701,- atau capaian realiasi keuangan adalah sebesar 42%.

Capaian kinerja sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk menunjang kegiatan operasional Inspektorat Kabupaten Balangan.

3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.47.192.000,- realisasi sebesar Rp.2.720.000,-

sisa pagu anggaran sebesar Rp.44.472.000,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 5%

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya penyediaan bahan bacaan selama 6 bulan.

4) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Pagu anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp.994.626.000,- realisasi sebesar Rp.484.119.318,- sisa anggaran sebesar Rp.510.506.682,-

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 6 bulan.

e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat sebesar Rp.6.100.000,- realisasi sebesar Rp.6.070.000,- sisa anggaran sebesar Rp.30.000,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 99,5%

Capaian kinerja sebesar 100% yaitu terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat selama 6 bulan.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp.205.224.900,- realisasi sebesar Rp.68.860.410,- sisa anggaran sebesar Rp.136.364.490,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 33,5%.

Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya pembayaran rekening listrik, PDAM, telepon dan wifi pada kantor Inspektorat selama 6 bulan.

3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan Rp.226.996.300,- sisa anggaran sebesar Rp.118.083.000,- sisa anggaran sebesar Rp.108.913.300,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 52%.

Capaian kinerja sub kegiatan kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya Penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 6 bulan.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Pagu anggaran sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp.497.223.000,- realisasi sebesar Rp.118.083.000,- sisa anggaran sebesar Rp.378.899.168,-
 Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan selama 6 bulan.
 - 2) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya
 Pagu anggaran sub kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar Rp.259.958.300,- realisasi Rp.65.238.700,- sisa anggaran sebesar Rp.194.719.600,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 25%.
 Capaian kinerja sebesar 50 % yaitu telah terpenuhinya Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya selama 6 bulan.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- a. Penyelenggaraan pengawasan internal
 - 1) Pengawasan kinerja pemerintah daerah
 Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan kinerja pemerintah daerah sebesar Rp.289.700.000,- realisasi Rp.63.219.600,- sisa anggaran sebesar Rp.226.480.400,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 21,82%
 Capaian kinerja sebesar 127% yaitu dari target 33 LHP realisasi sebanyak 42 LHP. Terdapat pengurangan pagu karena anggaran untuk biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan tidak lagi dibayarkan.
 - 2) Pengawasan keuangan pemerintah daerah
 Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan keuangan pemerintah daerah sebesar Rp.580.177.000,- realisasi Rp.65.264.136 sisa anggaran sebesar Rp.514.912.864,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 11,25%
 Capaian kinerja sebesar 200% yaitu dari target 10 LHP realisasi 20 LHP. Sedangkan realisasi keuangan akan dilaksanakan setelah perubahan belanja pada tahap pergeseran.

3) Reviu Laporan Kinerja

Pagu anggaran sub kegiatan Reviu laporan kinerja sebesar Rp.52.500.000,- realisasi Rp.16.050.000,- sisa anggaran Rp.36.450.000,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 30,57%.

Capaian kinerja sebesar 100 % yaitu telah terealisasi 2 LHP yang terdiri dari Laporan Hasil Reviu LKIP tahun 2022 dan Laporan Hasil Reviu LPPD tahun 2022 dari target 2 LHP. Sedangkan realisasi keuangan akan dilaksanakan setelah perubahan belanja pada tahap pergeseran.

Terdapat pengurangan pagu karena anggaran untuk biaya transportasi dalam rangka pemeriksaan tidak lagi dibayarkan.

4) Reviu Laporan Keuangan

Pagu anggaran sub kegiatan Reviu laporan keuangan sebesar Rp.62.190.000,- realisasi sebesar Rp.58.176.700,- sisa anggaran sebesar Rp.4.013.300,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 93,55%

Capaian kinerja sub kegiatan Reviu laporan keuangan sebesar 100% yaitu telah dilaksanakan reviu LKPD tahun 2022. Sedangkan realisasi keuangan akan dilaksanakan setelah perubahan belanja pada tahap pergeseran.

5) Pengawasan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan Desa sebesar Rp.1.494.990.000,- realisasi sebesar Rp.0,00,- .Capaian kinerja sub kegiatan pengawasan desa sebesar 0%.

Pagu anggaran pada Sub Kegiatan Pengawasan Desa terdapat pengurangan anggaran karena anggaran transport dalam rangka menunjang kegiatan pemeriksaan tidak lagi dibayarkan dan pada anggaran murni direncanakan akan melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD tidak bisa dilaksanakan karena tidak lagi menjadi indikator penilaian MCP KPK tahun 2024 sehingga alokasi dana pada sub kegiatan ini dialihkan untuk kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan serta untuk menunjang untuk kegiatan pada program asistensi dan pendampingan.

6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pagu anggaran sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebesar

Rp.1.130.420.000,- realisasi sebesar Rp.51.368.060,- sisa anggaran sebesar Rp.1.079.051.940,-

Capaian kinerja masih belum bisa dilaporkan karena rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut dengan BPK akan dilaksanakan di bulan Juli 2023 sedangkan penyelesaian tindak lanjut APIP masih dalam proses monitoring tindak lanjut.

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Pagu anggaran sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.42.990.000,- realisasi Rp.4.500.000,- sisa anggaran sebesar Rp.38.490.000,-

Capaian kinerja sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah 50 % yaitu tersusunnya laporan matrik pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester I tahun 2023.

2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pagu anggaran sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp.674.100.000,- realisasi sebesar Rp.131.470.900,- sisa anggaran sebesar Rp.542.629.100,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 19,50%

Capaian kinerja sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebesar 104% dari target 73 LHP realisasi 76 LHP.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi

1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.177.575.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.15.780.000,- sisa anggaran sebesar Rp.161.795.000,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 8,89%.

Terdapat penambahan pada sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah karena pada anggaran perubahan akan melaksanakan pendampingan pelaksanaan PK SPIP

2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pagu anggaran sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebesar Rp.302.330.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.175.588.969,- sisa anggaran sebesar Rp.175.588.969,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 58,08%

- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pagu anggaran sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.1.082.523.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.164.809.788,- sisa anggaran sebesar Rp.917.713.212,- atau dengan capaian realisasi keuangan sebesar 15,22%.

Capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar 50 % yaitu telah terselesaikannya rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi dalam rangka pemenuhan data dukung MCP tahun 2023.

- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pagu anggaran sub kegiatan Indeks integritas sebesar Rp.857.786.600,- realisasi anggaran Rp.186.837.044,- sisa anggaran sebesar 670.948.556,- atau capaian realisasi keuangan sebesar 21,78%

Capaian kinerja sub kegiatan Indeks Integritas 20% yaitu telah dilakukan pendampingan dan asistensi kepada 6 SKPD dalam rangka pengusulan unit kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Kabupaten Balangan terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan

efisien. Inspektorat sampai dengan bulan juni 2024 telah melakukan pemeriksaan baik yang bersifat reguler maupun mandatory. Hasil dari pemantauan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan eksternal sampai dengan bulan juni tahun 2024 terdapat 941 rekomendasi dan telah ditindak lanjuti sejumlah 738 rekomendasi atau sebesar (78%).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Balangan tahun 2024 samapai dengan bulan juni 2024 yaitu telah melakukan ebanyak 41 pengawasan yang telah dilaksanakan yang terdiri dari :

- a. Pemeriksaan Opname Persediaan dan Penutupan Kas SKPD Tahun 2023
- b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa
- c. Monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut dari internal dan eksternal
- d. monev tindak lanjut dari hasil temuan BPK RI
- e. reviu terkait proyek strategis (5 terbesar)
- f. audit kepatuhan
- g. audit kinerja

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparat pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Sesuai Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menentukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan an perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan menetapkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan nomor 25 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah pada Bab IV bagian ketiga pasal 6 (enam) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepagawaian
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III
- f. Inspektur Pembantu Investigasi, Reformasi Birokrasi dan Koordinator Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Balangan melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dapat dicapai secara optimal.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Terkait dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, tujuannya adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel” dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Indikator Tujuan	Target	tahun
		2024
1. Persentase SKPD / Desa di wilayah yang bebas temuan material	80	
2. prosentase SKPD dengan nilai sakip A	6	

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan. Dengan demikian ditetapkan sasarannya adalah “Meningkatnya efektivitas pengawasan internal” dengan indikator sasaran sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Strategis	Target Tahun 2024
1	Level kapabilitas APIP	Level 3
2	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	83
3	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK	WBK : 2

	WBBM	
4	Jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi SAKIP BB	26
5	Prosentase capaian realisasi renaksi RB	80
6	Indeks evektifitas pengendalian korupsi	2,9

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Adapun program-program yang diusulkan Inspektorat Daerah Kabupaten Balangan pada tahun anggaran 2024 ada 3 (Program) sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawas
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Kegiatan dilakukan untuk merealisasikan program dan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan serta menterjemahkan aktivitas/layanan.

Pada tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Balangan total belanja sebesar Rp.24.942.503.298,- adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Program penyelenggaraan pengawas
 - 1.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - c. Reviu Laporan Kinerja
 - d. Reviu Laporan Keuangan
 - e. Pengawasan Desa
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - 1.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - 2.1 Pendampingan dan Asistensi
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3.3. Rencana Perubahan Renja

Inspektorat Kabupaten Balangan sejak awal sampai sekarang, telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan wewenang yang melekat padanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tengah segala keterbatasan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya dari sisi infrastruktur maupun aparatur.

Adapun faktor perubahan renja adalah dikarenakan adanya program dan kegiatan yang tidak bisa untuk direalisasikan serta adanya penambahan kegiatan baru karena kegiatan tersebut dianggap penting untuk dilaksanakan. Adapun rencana perubahan program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- 1.1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.2.495.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.2.495.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.0,00.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.65.283.800,- dan setelah perubahan sebesar Rp.65.283.800,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.0,00,-
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SKPD pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.13.893.269.970,- setelah perubahan sebesar Rp.12.897.449.090,- terdapat pengurangan sebesar Rp.995.820.880,-
- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.119.059.100,- dan setelah perubahan sebesar Rp.163.311.100,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.44.252.000,-

- b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pagu anggaran sebesar Rp.669.255.000,- setelah perubahan sebesar Rp.1.549.207.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.879.952.000,-.
- c. Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.084.700.000,- setelah perubahan sebesar Rp.886.250.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.198.450.000,-

1.4 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

- a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.445.275.100,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.771.924.500,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.326.649.400,-
- b. Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.87.236.100,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.102.968.200,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.15.732.100,-.
- c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.47.192.000,- setelah perubahan sebesar Rp.12.192.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.35.000.000,-
- d. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pagu sebelum perubahan sebesar Rp.994.626.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.720.314.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.725.688.000,- karena diasumsikan ada kekurangan anggaran untuk memenuhi kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sampai dengan bulan desember.

1.5 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

- a. Pengadaan kendaraan operasional atau lapangan pagu sebelum perubahan sebesar Rp.0,00,- setelah perubahan menjadi Rp.280.000.000,00 untuk pengadaan 2 kendaraan roda dua sebanyak 8 unit.

1.6 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Penyediaan jasa surat menyurat pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.6.100.000,- setelah perubahan menjadi Rp.12.100.000,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.6.000.000,-.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.205.224.900,- setelah perubahan menjadi Rp.185.798.250,- terdapat pengurangan alokasi anggaran sebesar

Rp.19.426.650,- yang akan dipergunakan untuk pembayaran listrik inspektorat karena alokasi anggaran hanya mampu mengakomodir pembayaran listrik sampai dengan bulan juli sehingga diperlukan penambahan anggaran.

- c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor pagu anggaran sebesar Rp.226.996.300,- setelah perubahan menjadi Rp.244.996.300,- terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,-.

1.7 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.497.223.000,- setelah perubahan menjadi Rp.643.247.400,- terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.146.024.400,-
- b. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.259.958.300,- setelah perubahan menjadi Rp.259.278.300,- terdapat pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp.680.000,-.

2. Program penyelenggaraan pengawasan

2.1 Penyelenggaraan pengawasan internal

- a. Pengawasan kinerja pemerintah daerah pagu sebelum perubahan sebesar Rp.289.700.000,- setelah perubahan menjadi Rp.259.700.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.30.000.000,-
- b. Pengawasan keuangan pemerintah daerah pagu sebelum perubahan sebesar Rp.580.177.000,- setelah perubahan menjadi Rp.579.568.600,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.608.400,-
- c. Reviu laporan kinerja pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.52.500.000,- setelah perubahan menjadi Rp.16.500.000,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.36.000.000,-
- d. Reviu Laporan Keuangan pagu anggaran sebesar Rp.62.190.000,- setelah perubahan menjadi Rp.62.190.000,- tidak terdapat pengurangan ataupun penambahan belanja.

- e. Pengawasan Desa pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.494.990.000,- setelah perubahan menjadi Rp.327.150.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp. 1.167.840.000,-
 - f. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.130.420.000,- setelah perubahan menjadi Rp.1.151.246.400,- terdapat penambahan sebesar Rp.20.826.400,-
- 2.2 Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
- a. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah pagu sebelum perubahan sebesar Rp.42.990.000,- setelah perubahan menjadi Rp.37.900.000,- terdapat pengurangan sebesar Rp.5.090.000,-.
 - b. Pengawasan dengan tujuan tertentu pagu sebelum perubahan sebesar Rp.674.100.000,- setelah perubahan menjadi Rp.674.100.000,-
3. Program Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- 3.1 Pendampingan dan asistensi
- a. Pendampingan dan aistensi urusan pemerintahan daerah dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.177.575.000,- setelah perubahan menjadi Rp.183.525.000,- terdapat penambahan sebesar Rp.5.950.000,-
 - b. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.302.330.000,- setelah perubahan menjadi Rp.302.330.000,-
 - c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemeberantasan korupsi dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.1.082.523.000,- setelah perubahan menjadi Rp.1.230.196.000,- terdapat penambahan aloassi anggaran sebesar Rp.147.673.000,-
 - d. Pandampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas dengan pagu anggaran sebesar Rp.857.785.600,- setelah perubahan menjadi 1.099.951.600,- terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.242.166.000,-.

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta plafon anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel matrik (terlampir).

3.4 Dampak Sosial Ekonomi

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Balangan, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 disusun untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang nantinya akan berdampak kepada social ekonomi, diantaranya:

1. Terlaksananya Pemeriksaan Reguler, Desa, Khusus dan Penanganan Kasus Aduan masyarakat
2. Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal
3. Melaksanakan pendampingan dan asistensi dalam rangka upaya pencegahan korupsi di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan
4. Terlaksananya fungsi consulting

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan dan Penganggaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam perencanaan dan penganggaran disusun dan dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan sesuai sasaran yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, diharapkan dukungan anggaran yang sesuai dengan usulan yang tertuang dalam naskah ini agar program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat mencapai sasaran. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini sangat tergantung pada tekad, semangat, dan keinginan untuk maju dengan dukungan sikap mental yang kuat dan disiplin dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Parangin, Juli 2024

Inspektur Kabupaten Balangan



Drs. Urai Nur Iskandar, MM

NIP. 19730501 199311 1 001

**TABEL PERUBAHAN TAHUN 2024
KABUPATEN BALANGAN**

SKPD : INSPEKTORAT

NO	SEBELUM PERUBAHAN					SESUDAH PERUBAHAN					Keterangan/Catatan penting	Unit SKPD
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp.000)	Jumlah Perubahan (+/-)		
Total Pagu					24.942.503.298				25.721.172.540	778.669.242		Inspektorat
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Balangan	73 (BB)	18.195.222.698	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Inspektorat	Kab. Balangan	73 (BB)	19.796.814.940	Rp 1.601.592.242,00		Inspektorat
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Kab. Balangan	88		Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Balangan	88				
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Balangan	100%	67.778.800	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan dengan baik	Kab. Balangan	100%	67.778.800	Rp -		Inspektorat
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	2.495.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 Dokumen	2.495.000	Rp -		Inspektorat
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Laporan	65.283.800	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	4 Laporan	65.283.800	Rp -		Inspektorat
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	13.484.598.098	Cakupan pelaksanaan Keuanagan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Balangan	100%	12.897.449.090	-Rp 587.149.008,00		Inspektorat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Balangan	630 orang	13.484.598.098	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Balangan	630 orang	12.897.449.090	-Rp 587.149.008,00		Inspektorat

3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	1.873.014.100	Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Balangan	100%	2.598.768.100	Rp 725.754.000,00		Inspektorat
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Balangan	2 paket	119.059.100	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Balangan	3 paket	163.311.100	Rp 44.252.000,00		Inspektorat
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Balangan	45 pegawai	669.255.000	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Balangan	65 pegawai	1.549.207.000	Rp 879.952.000,00		Inspektorat
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	50 pegawai	1.084.700.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	30 pegawai	886.250.000	-Rp 198.450.000,00		Inspektorat
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	1.574.329.200	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Balangan	100%	2.607.398.700	Rp 1.033.069.500,00		Inspektorat
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	4 paket	445.275.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	9 paket	771.924.500	Rp 326.649.400,00		Inspektorat
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	2 paket	87.236.100	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Balangan	2 paket	102.968.200	Rp 15.732.100,00		Inspektorat
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	120 dokumen	47.192.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Balangan	120 dokumen	12.192.000	-Rp 35.000.000,00		Inspektorat
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	70 laporan	994.626.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	85 laporan	1.720.314.000	Rp 725.688.000,00		Inspektorat
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	Kab. Balangan	100%	0.000	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai RKB	Kab. Balangan	100%	280.000.000	Rp 280.000.000,00		Inspektorat

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Balangan	0	0.000	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Balangan	8 unit	280.000.000	Rp 280.000.000,00		Inspektorat
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	Kab. Balangan	100%	438.321.200	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Balangan	100%	442.894.550	Rp 4.573.350,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 laporan	6.100.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	12 laporan	12.100.000	Rp 6.000.000,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	36 laporan	205.224.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Balangan	36 laporan	185.798.250	-Rp 19.426.650,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 laporan	226.996.300	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Balangan	12 laporan	244.996.300	Rp 18.000.000,00		Inspektorat
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	Kab. Balangan	100%	757.181.300	Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Balangan	100%	902.525.700	Rp 145.344.400,00		Inspektorat
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Balangan	36 unit	497.223.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Balangan	40 unit	643.247.400	Rp 146.024.400,00		Inspektorat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	1 unit	259.958.300	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Balangan	1 unit	259.278.300	-Rp 680.000,00		Inspektorat
II	<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</i>	Prosentase SKPD yang selesai TLHP	Kab. Balangan	55%	4.327.067.000	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Kab. Balangan	55%	3.108.355.000	-Rp 1.218.712.000,00		Inspektorat

		Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	Kab. Balangan	60%				60%				
		Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	Kab. Balangan	60%				60%				
8	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	Kab. Balangan	18	3.609.977.000	% SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja Minimal BB	Kab. Balangan	18	2.396.355.000	-Rp 1.213.622.000,00		Inspektorat
		Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administrasi dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti		180		Persentase SKPD di Wilayah yang bebas temuan		180				
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	33 Laporan	289.700.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	33 Laporan	259.700.000	-Rp 30.000.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	10 laporan	580.177.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Balangan	10 laporan	579.568.600	-Rp 608.400,00		Inspektorat
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Balangan	2 laporan	52.500.000	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kab. Balangan	2 laporan	16.500.000	-Rp 36.000.000,00		Inspektorat
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Balangan	1 laporan	62.190.000	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kab. Balangan	1 laporan	62.190.000	Rp -		Inspektorat
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Balangan	3 laporan	1.494.990.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kab. Balangan	3 laporan	327.150.000	-Rp 1.167.840.000,00		Inspektorat
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Balangan	2 dokumen	1.130.420.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Balangan	2 dokumen	1.151.246.400	Rp 20.826.400,00		Inspektorat

9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani	Kab. Balangan	100%	717.090.000	Persentase SKPD di Wilayah yang bebas Temuan Keuangan Material Eksternal	Kab. Balangan	100%	712.000.000	-Rp 5.090.000,00		Inspektorat
		Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Kab. Balangan	4,2		Persentase Hasil Pemeriksaan Investigasi/kasus yang diselesaikan	Kab. Balangan	4,2				
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kab. Balangan	2 laporan	42.990.000	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kab. Balangan	2 laporan	37.900.000	-Rp 5.090.000,00		Inspektorat
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Balangan	73 Laporan	674.100.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Balangan	73 laporan	674.100.000	Rp -		Inspektorat
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM	Kab. Balangan	25%	2.420.213.600	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM	Kab. Balangan	25%	2.816.002.600	Rp 395.789.000,00		Inspektorat
		Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	Kab. Balangan	85%		Level Maturitas SPIP	Kab. Balangan	85%				
		Nilai MCP	Kab. Balangan	92		Indeks Integritas	Kab. Balangan	92				
10	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM	Kab. Balangan	WBK :8	2.420.213.600	prentase SKPD yang menyusun profil risiko sesuai dengan standart yang berlaku	Kab. Balangan	WBK :8	2.816.002.600	Rp 395.789.000,00		Inspektorat
		Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	Kab. Balangan	82%		Nilai PMPRB	Kab. Balangan	82%				
		Prosentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi	Kab. Balangan	92		Persentase Pencapaian Indikator MCP	Kab. Balangan	92				
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	32 Perangkat daerah	177.575.000	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	30 Perangkat daerah	183.525.000	Rp 5.950.000,00		Inspektorat

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Balangan	32 perangkat daerah	302.330.000	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Balangan	15 perangkat daerah	302.330.000	Rp	-		Inspektorat
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Balangan	3 kegiatan	1.082.523.000	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Balangan	1 kegiatan	1.230.196.000	Rp	147.673.000,00		Inspektorat
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Balangan	32 perangkat daerah	857.785.600	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Balangan	21 perangkat daerah	1.099.951.600	Rp	242.166.000,00		Inspektorat

Paringin, Juli 2024

Inspektur Kabupaten Balangan,



Drs. Uraf Nu Iskandar, MM
NIR. 19730501 199311 1 001